ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS TRANSPARANSI DALAM USAHA MAKANAN: STUDI KASUS AYAM GORENG WIDURAN DI SOLO BERDASARKAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Deva Aurelia Rahma *¹
Raysha Aulia Fazila ²
Nastiti Respati Sedyo ³
Raden Roro Kamilia Hana Putri ⁴
Sarah Agnesya Putri Siahaan ⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
*e-mail: ¹2210611442@mahasiswa.upnvj.ac.id, ²2210611466@mahasiswa.upnvj.ac.id,
³2210611182@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁴2310611457@mahasiswa.upnvj.ac.id,
⁵2310611463@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

ini dilatarbelakangi oleh munculnya kasus usaha makanan Ayam Goreng Widuran di Kota Solo yang tidak mencantumkan informasi kandungan non-halal dalam produknya, yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah kesesuaian penerapan asas transparansi informasi produk makanan oleh pelaku usaha dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta mekanisme Penelitian penegakan kewajiban tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi mengenai kandungan non-halal belum disampaikan secara benar, jelas, dan jujur, sehingga melanggar hak konsumen. Di samping itu, mekanisme pengawasan dan sanksi yang belum efektif berkontribusi pada lemahnya kepatuhan pelaku usaha. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan sosialisasi, pengawasan oleh BPKN dan BPJPH, serta keterlibatan aktif pemerintah daerah dan LPKSM dalam penegakan dan edukasi hukum.

Kata kunci: asas transparansi, perlindungan konsumen, informasi produk

Abstract

This study is motivated by a case involving Ayam Goreng Widuran, a food business in Solo, which failed to provide clear information about its non-halal content, raising public concern. The issues examined include the compliance of transparency principles in food product information with the Consumer Protection Law and the enforcement mechanism of this obligation. This research uses normative juridical methods by analyzing statutory regulations and a case study approach. The findings indicate that the information on non-halal content was not delivered accurately and honestly, violating consumer rights. Moreover, weak enforcement and the absence of firm sanctions contribute to low compliance among food businesses. The study recommends strengthening public awareness and supervision by BPKN and BPJPH, along with a more active role of local government and consumer protection organizations in legal education and monitoring.

Keywords: transparency principle, consumer protection, product information

PENDAHULUAN

Transparansi adalah salah satu prinsip dasar dalam perlindungan konsumen, khususnya dalam sektor makanan. Kebutuhan konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan jujur tentang produk yang mereka konsumsi merupakan bagian dari hak asasi yang dilindungi oleh hukum. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, informasi mengenai halal atau haramnya suatu produk makanan memiliki makna yang sangat penting, baik dari segi hukum maupun secara moral dan keagamaan.

Penerapan asas transparansi menjadi semakin krusial seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak mereka atas informasi. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus publik yang mengangkat ketidakpuasan publik terhadap pelaku usaha yang gagal dalam memberikan informasi yang memadai mengenai kandungan suatu produk, termasuk bahan makanan yang mengandung bahan non-halal. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas menyatakan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan informasi

yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Hal ini didukung oleh Pasal 4 huruf c yang menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan informasi tersebut sebagai bagian dari perlindungan menyeluruh terhadap konsumen.¹

Kasus Ayam Goreng Widuran di Solo menjadi bukti nyata bahwa ketidakhati-hatian pelaku usaha dalam memberikan informasi secara jelas dapat menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Restoran legendaris ini telah menggunakan minyak babi dalam proses memasaknya selama puluhan tahun tanpa mencantumkan informasi yang jelas kepada publik. Hal ini menimbulkan kecaman luas, khususnya dari pelanggan Muslim yang merasa hak mereka untuk memperoleh informasi telah diabaikan. Kegagalan memberikan informasi secara terbuka mencerminkan kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha serta rendahnya pemahaman tentang regulasi halal yang berlaku.²

Kejadian ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dalam usaha makanan belum diterapkan dengan efektif. Padahal, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah menetapkan dengan jelas bahwa produk yang tidak sesuai dengan standar halal wajib mencantumkan label non-halal dengan jelas.³ Bahkan, peraturan pelaksanaannya melalui PP No. 42 Tahun 2024 menegaskan bahwa pelaku usaha harus menyampaikan informasi non-halal guna melindungi hak konsumen agar dapat menentukan pilihan sesuai dengan keyakinan mereka.⁴

Direktur LPH LPPOM MUI, Muti Arintawati, menyatakan bahwa menutupi informasi mengenai ketidakhalalan produk adalah pelanggaran terhadap hak konsumen. Ia menegaskan bahwa masyarakat Indonesia yang beragam dapat menerima adanya restoran non halal, asalkan informasi tersebut disampaikan dengan jujur dan terbuka.⁵

Fenomena Ayam Goreng Widuran mengangkat isu hukum yang penting untuk diteliti, yaitu bagaimana penerapan asas transparansi di sektor makanan selama ini, dan bagaimana ketentuan perundang-undangan dapat ditegakkan untuk memastikan pelaku usaha mematuhi kewajiban tersebut. Selain itu, kasus ini juga mencerminkan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan sistem pelabelan yang lebih akuntabel dan profesional.⁶

Fakta bahwa pelaku usaha baru mencantumkan label non-halal setelah kasus ini viral di media sosial menunjukkan lemahnya sistem *self-declare* dan rendahnya kepatuhan sukarela terhadap prinsip transparansi informasi. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait, seperti BPJPH, Satpol PP, dan Dinas Perdagangan setempat, kurang efektif. Dalam hal ini, konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan karena tidak mendapatkan perlindungan optimal seperti yang diamanatkan oleh regulasi yang ada.⁷

Dengan demikian, penting untuk dilakukan analisis hukum secara mendalam mengenai sejauh mana asas transparansi telah diterapkan oleh pelaku usaha di Indonesia, terutama dalam kasus Ayam Goreng Widuran. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana mekanisme penegakan hukum dan pengawasan dapat diperkuat agar hak konsumen benar-benar terlindungi sebagaimana diamanatkan oleh regulasi yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas penerapan asas transparansi dalam sektor makanan di Indonesia, serta merumuskan rekomendasi hukum guna memperkuat perlindungan konsumen, khususnya dalam konteks

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf c.

² Admin LPH UB, "Transparansi halal di ujung meja makan: Kasus Ayam Goreng Widuran dan pelajaran bagi UMKM kuliner," *LPH UB*, <https://lphub.ub.ac.id/publication/details/transparansi-halal-di-ujung-meja-makan-kasus-ayam-goreng-widuran-dan-pelajaran-bagi-umkm-kuliner> (diakses 11 Juni 2025).

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 17 ayat (2).

⁴ Muti Arintawati, "Kasus Ayam Goreng Widuran, LPH LPPOM soroti pentingnya transparansi informasi produk tidak halal," *MUI.or.id*, <https://mui.or.id/baca/berita/kasus-ayam-goreng-widuran-lph-lppom-soroti-pentingnya-transparansi-informasi-produk-tidak-halal> (diakses 11 Juni 2025).

⁵ *Ibid.*

⁶ Tutik Nurul Janah, "Upaya perlindungan konsumen Muslim dan non-Muslim melalui sertifikasi halal dan transparansi komposisi produk makanan," *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 9, no. 1 (2020): 70.

⁷ Maulida Agustina, *Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan yang Tidak Berlabel Halal di Kota Banda Aceh* (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2023), hlm. 65–66.

produk makanan non-halal. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini akan berfokus pada pemecahan masalah hukum yang muncul dalam kasus Ayam Goreng Widuran di Solo melalui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kesesuaian penerapan asas transparansi informasi produk makanan, termasuk informasi mengenai kandungan non-halal, pada usaha Ayam Goreng Widuran di Solo dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimanakah mekanisme untuk memastikan ketaatan pelaku usaha terhadap kewajiban transparansi informasi produk makanan, termasuk informasi non-halal, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan asas transparansi pada kasus Ayam Goreng Widuran di Solo. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sementara bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, artikel ilmiah, dan karya tulis lainnya yang mendukung analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dan data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pelaksanaan kewajiban transparansi informasi produk oleh pelaku usaha serta efektivitas penegakannya dalam perspektif perlindungan konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Penerapan Asas Transparansi Informasi Produk Makanan pada Usaha Ayam Goreng Widuran di Solo dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Indonesia telah mengatur terkait perlindungan konsumen di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam UU tersebut telah mengatur juga hak-hak konsumen, tepatnya pada Pasal 4. Pasal ini menyebutkan bahwa sebagai konsumen, maka berhak untuk:

- a. Mendapatkan kenyamanan dan keselamatan saat menggunakan barang dan/ atau jasa yang telah dibeli.
- b. Memilih dan mendapatkan barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai yang ditukar dan kondisi sesuai yang dijanjikan.
- c. Mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang telah dibelinya.
- d. Didengar segala bentuk pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan.
- e. Mendapatkan advokasi, perlindungan, dan juga upaya penyelesaian yang patut.
- f. Mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Dilayani dengan baik, adil, benar dan tidak diskriminatif.
- h. Mendapatkan kompensasi atas kerugian yang timbul dan juga ketidaksesuaian produk sebagaimana mestinya.
- i. Dan hak-hak lainnya yang diatur di perundang-undangan lain.

Apabila melihat di dalam ketentuan Pasal 4 huruf c, tertera bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi secara jujur dan juga benar terkait produk barang dan/atau jasa yang telah dibelinya. Ketentuan ini memiliki korelasi langsung dengan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 huruf b, yang dijelaskan oleh penelitian terdahulu menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang sesuai mengenai kondisi

produk yang diperdagangkan.⁸ Informasi produk dapat berupa bahan, proses produksi dan juga salah satu unsur penting terkhusus untuk pemeluk agama Islam adalah status halal dari produk tersebut. Kepastian hukum atas kehalalan produk harus dijamin oleh negara melalui keterkaitan antara Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK dan implementasi UU Jaminan Produk Halal, dimana konsumen muslim berhak mengetahui serta dilindungi dari produk yang tidak sesuai dengan keyakinan agamanya.⁹

Selain itu, terdapat suatu keharusan bagi para pelaku usaha untuk mencantumkan label halal tidak semata-mata hanya untuk keperluan administratif, melainkan sebagai bagian dari asas keterbukaan informasi kepada hak konsumen sebagaimana yang diatur didalam Pasal 4.¹⁰ Dalam teori hukum Gustav Radbruch, hukum ideal harus memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Transparansi informasi halal pada produk makanan merupakan wujud nyata dari keadilan bagi konsumen, terlebih umat Islam, yang sangat memperhatikan aspek kehalalan dalam setiap konsumsi.¹¹ Penyelenggaraan produk halal harus didasarkan pada asas perlindungan, transparansi, dan akuntabilitas, dan bahwa manfaat dari kepatuhan terhadap aturan tersebut tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga menambah nilai jual produk secara ekonomi bagi pelaku usaha.¹²

Jika melihat praktik di lapangan, banyak pelaku usaha yang menyatakan produknya halal tanpa memiliki sertifikasi atau label resmi. Hal ini menimbulkan risiko keraguan dan ketidakpastian hukum di kalangan konsumen. Dalam hal ini, jika pelaku usaha menyebutkan bahwa produknya halal, maka ia wajib mencantumkan label halal dan bertanggung jawab secara penuh atas kehalalan produk tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK yang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi barang tanpa mengikuti ketentuan produksi halal jika label halal telah dicantumkan. Ketidaksesuaian informasi atau bahkan pengaburan status halal merupakan pelanggaran serius terhadap asas keterbukaan informasi, dan dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan publik.¹³

Selain itu, masih terdapat kelemahan regulasi dalam hal sanksi atas pelanggaran kewajiban mencantumkan label halal. Bahwa Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal yang mewajibkan setiap produk yang beredar di Indonesia bersertifikat halal, tidak diiringi dengan ketentuan sanksi pidana yang tegas, sehingga terjadi kekosongan norma. Dalam hal ini, merupakan bentuk inkonsistensi hukum yang bertentangan dengan asas positivisme hukum, dimana keberadaan norma hukum seharusnya dilengkapi dengan unsur sanksi agar memiliki kekuatan mengikat. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kewajiban sertifikasi halal, meskipun secara formal masih dianggap administratif, tetap memiliki dampak luas terhadap rasa aman dan perlindungan konsumen, serta seharusnya dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan konsumen.¹⁴

2. Mekanisme Penegakan Kewajiban Transparansi Informasi Produk Makanan oleh Pelaku Usaha dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁸ Asrul Aswar dan Resdianto Willem, "Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi konsumen," *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 5, no. 1 (2023).

⁹ Yusuf Shofie, "Jaminan atas produk halal dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen," *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1 (2018): 33, <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss1/3>.

¹⁰ Syafrida dan Ralang Hartati, "Mewujudkan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hak konsumen Muslim terhadap produk halal (suatu kajian ajaran Gustav Radbruch)," *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2019): 41, <https://ejournal.utama.ac.id/index.php/replik/article/view/2416>.

¹¹ *Ibid.*, 42.

¹² *Ibid.*, 42.

¹³ Muthia Sakti, Dwi Aryanti R., dan Yuliana Yuli W., "Perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan yang tidak bersertifikat halal," *Jurnal Yuridis* 2, no. 1 (2015): 62–77, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/1037>.

¹⁴ Iffaty Nasyi'ah, "Pelanggaran kewajiban pendaftaran sertifikat halal: Dapatkah dibuat sanksi?" *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 9, no. 1 (2018): 90, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/6512>.

Kewajiban transparansi informasi produk makanan merupakan salah satu pilar utama dalam perlindungan konsumen di Indonesia. Pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang diperdagangkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁵ Transparansi ini tidak hanya mencakup aspek keamanan dan mutu produk, tetapi juga detail mengenai bahan baku, tanggal kedaluwarsa, petunjuk penyimpanan, hingga status kehalalan produk, yang sangat penting terutama bagi konsumen Muslim. Dengan adanya mekanisme transparansi informasi yang efektif, konsumen dapat membuat keputusan yang cerdas dan merasa terlindungi, sementara pelaku usaha dapat membangun kepercayaan serta loyalitas pelanggan dalam jangka panjang.

Undang-Undang No. 8 tentang Perlindungan Konsumen terkhususnya pada Pasal 8 Ayat (1) telah mengatur larangan pemalsuan label, keterangan palsu, label tidak lengkap, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang dapat merugikan konsumen. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk pangan yang berpotensi membahayakan atau memberikan informasi yang menyesatkan serta menjamin bahwa informasi yang tertera pada label pangan adalah benar dan dapat dipercaya. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan mengenai label pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat dikenai sanksi hukum, termasuk denda atau tindakan hukum lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut.¹⁶

Peraturan BPOM juga mewajibkan setiap pangan olahan yang diproduksi atau diedarkan di Indonesia untuk mencantumkan label yang menggunakan bahasa Indonesia dengan ukuran huruf yang mudah dibaca, serta informasi nilai gizi yang wajib dicantumkan pada pangan olahan. Sementara itu, Undang-Undang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa setiap produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal dan mencantumkan label halal pada kemasannya. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebagai bentuk perlindungan konsumen Muslim dan untuk memastikan kehalalan produk yang beredar di masyarakat.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 mengatur perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) dengan menetapkan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap pelaku usaha. Dalam peraturan ini, pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran serius dapat dikenai sanksi, termasuk pencabutan izin usaha.¹⁷ Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas perdagangan elektronik dan melindungi konsumen dari praktik usaha yang merugikan. Jika pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut, pemerintah dapat memberikan peringatan dan menindaklanjuti dengan pencabutan izin usaha sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas.

Prinsip transparansi merupakan salah satu bagian penting dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan menjadi elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi mengharuskan pemerintah untuk membuka akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat, sehingga publik dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kebijakan, keputusan, serta pelaksanaan pemerintahan.¹⁸ Pemerintah melalui lembaga-lembaganya berupaya meningkatkan perlindungan dan jaminan terhadap produk yang beredar di pasar, termasuk kepastian mutu, kuantitas, dan keamanan barang serta jasa yang diperoleh masyarakat demi meningkatkan

¹⁵ Andriyawan, dkk., "Pertanggungjawaban pelaku usaha kuliner atas kelalaian yang dilakukan oleh pegawainya (contoh kasus insiden masuknya tikus di gerai Dough Lab cabang PIK Avenue Jakarta)," *Jurnal Ranah Research* 7, no. 3 (2025): 1929, <https://doi.org/10.38035/rrij.v7i3>.

¹⁶ Paulus Manggala, dkk., "Perlindungan hukum bagi konsumen dalam pencantuman label pangan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, no. 1 (2024): 169, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.899>.

¹⁷ Nabilah Febriana, dkk., "Kebijakan hukum terhadap asas perlindungan konsumen pada praktik lelang mobil secara online," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.3913>.

¹⁸ Wien Sukarmini, "Penerapan prinsip efektivitas dan prinsip transparansi dalam penyelesaian perkara persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)," *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 47–81.

kesejahteraan. Dalam konteks ini, peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) menjadi sangat penting sebagai mitra pemerintah dan bagian dari upaya perlindungan konsumen secara menyeluruh. LPKSM diakui keberadaannya oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan memiliki tugas serta fungsi yang diatur dalam Pasal 44 UU tersebut. Fungsi utama LPKSM meliputi penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran konsumen mengenai hak, kewajiban, dan kehati-hatian dalam mengkonsumsi barang dan jasa; memberikan nasihat kepada konsumen yang membutuhkan; bekerja sama dengan instansi terkait dalam mewujudkan perlindungan konsumen; membantu konsumen memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan; serta melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.¹⁹

Hal ini tidak hanya berpegang pada peran pemerintah, tetapi harus ada upaya preventif dan edukatif kepada pelaku usaha makanan merupakan langkah strategis yang penting untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap hak-hak konsumen. Dengan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kewajiban transparansi informasi produk, standar keamanan pangan, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran, pelaku usaha diharapkan dapat lebih bertanggung jawab dalam memproduksi dan memasarkan produk makanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

BPOM memiliki upaya preventif untuk mengatasi peredaran makanan kedaluwarsa dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang atau pelaku usaha. Pengawasan ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu pre-market, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum produk diedarkan ke masyarakat untuk dikonsumsi, dan pro-market, yaitu pengawasan yang dilakukan saat produk sudah beredar atau dijual kepada konsumen. Sementara itu, upaya represif yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Proses ini dijalankan apabila ada laporan atau pengaduan dari konsumen dan dilakukan secara bertahap; pertama dilakukan mediasi, jika mediasi tidak mencapai kesepakatan maka dilanjutkan dengan konsiliasi, dan apabila konsiliasi gagal menghasilkan solusi, maka dilakukan arbitrase sebagai langkah terakhir.²⁰

Penguatan regulasi dan penerapan sistem pengawasan yang terintegrasi di sektor usaha makanan lokal sangat penting untuk memastikan perlindungan konsumen dan keamanan produk yang beredar. Regulasi yang lebih jelas dan tegas, terutama mengenai kewajiban pelabelan, sertifikasi halal, serta standar keamanan dan mutu pangan, perlu disosialisasikan secara luas kepada pelaku usaha, termasuk pelaku UMKM. Selain itu, pengawasan yang melibatkan berbagai pihak seperti BPOM, dinas kesehatan, dinas perdagangan, dan lembaga perlindungan konsumen harus dilakukan secara bersama-sama agar koordinasi dan pengawasan bisa berjalan lebih efektif. Pemanfaatan teknologi informasi juga bisa membantu mempermudah pemantauan dan pelaporan pelanggaran secara cepat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaku usaha makanan lokal lebih disiplin dalam menjalankan aturan, sehingga konsumen merasa aman dan terlindungi, sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal di pasar. Hal ini menjadi langkah penting untuk membangun sistem pangan yang transparan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan asas transparansi dalam usaha makanan, sebagaimana ditunjukkan pada kasus Ayam Goreng Widuran di Solo, belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketidakhadiran informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kandungan non-halal dalam produk makanan yang dijual

¹⁹ Adnand Alfina, "Fungsi perlindungan konsumen dan peran lembaga perlindungan konsumen di Indonesia: Perlindungan, konsumen dan pelaku usaha (literature review)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021), <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6>.

²⁰ Yoel Subagyo, "Perlindungan konsumen dan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 60–68.

mencerminkan pengabaian terhadap hak konsumen, khususnya konsumen Muslim, untuk mengetahui kandungan produk sesuai dengan keyakinan mereka. Hal ini menunjukkan masih lemahnya kesadaran hukum pelaku usaha serta belum efektifnya mekanisme pengawasan dan penegakan kewajiban transparansi oleh pihak yang berwenang. Di sisi lain, regulasi yang ada belum sepenuhnya dilengkapi dengan sanksi tegas terhadap pelanggaran transparansi, yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pencantuman label halal atau non-halal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap kewajiban informasi produk, serta mendorong revisi regulasi agar mencantumkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran informasi produk non-halal. Selain itu, peran Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di daerah perlu diperkuat dalam penegakan aturan label pangan, khususnya dalam pengawasan lapangan terhadap pelaku usaha makanan lokal. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) juga didorong untuk aktif memberikan edukasi hukum kepada pelaku usaha makanan dan masyarakat sebagai bentuk pencegahan pelanggaran, serta menjadi mitra kritis dalam pengawasan dan advokasi perlindungan konsumen secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Karya Ilmiah:

- Agustina, M. (2023). *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Banda Aceh Ditinjau Dari UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di LPPOM MPU Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Andryawan, A., Calvianson, Y., & Satriani, F. (2025). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kuliner atas Kelalaian yang dilakukan oleh Pegawainya (Contoh Kasus Insiden Masuknya Tikus Digerai Dough Lab Cabang PIK Avenue Jakarta). *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(3), 1928-1938.
- Aswar, A., & Willem, R. (2023). Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam Memberikan Perlindungan Hukum yang Adil Bagi Konsumen. *Alauddin Law Development Journal*, 5(1), 11-23.
- Febriana, N., & Zazili, A. (2025). Kebijakan Hukum terhadap Asas Perlindungan Konsumen pada Praktik Lelang Mobil secara Online. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 12-12.
- Janah, T. N. (2020). Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Dan Non-Muslim Melalui Sertifikasi Halal Dan Transparansi Komposisi Produk Makanan. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 9(1), 65-85.
- Maharani, A., & Dzikra, A. D. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659-666.
- Nasyi'ah, I. (2018). Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal: Dapatkah Dibuat Sanksi?. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 9(1), 84-108.
- Pandie, P. M. P., & Aloysius, S. (2024). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Pencantuman Label Pangan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(1), 160-176.
- Sakti, M., Ramadhani, D. A., & Wahyuningsih, Y. Y. (2015). Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 62-77.

Shofie, Y. (2015). Jaminan atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Syariah*, 3, 28-69.

Sukarmini, W., & Idrus, N. S. (2020). Penerapan Prinsip Efektivitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Jurnal Yuridis*, 7(1), 47-81.

Syafrida, S., & Hartati, R. (2020). Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch). *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 7(1), 38-54.

Utomo, S. S., & Alfredo, Y. F. (2023). Perlindungan Konsumen dan Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 60-68.

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*.

Sumber Lainnya:

Admin LPH UB. (2025). *Transparansi halal di ujung meja makan: Kasus Ayam Goreng Widuran dan pelajaran bagi UMKM kuliner*. Diakses pada tanggal 11 Juni 2025, dari <https://lphub.ub.ac.id/publication/details/transparansi-halal-di-ujung-meja-makan-kasus-ayam-goreng-widuran-dan-pelajaran-bagi-umkm-kuliner>.

Arintawati, M. (2025). *Kasus Ayam Goreng Widuran, LPH LPPOM soroti pentingnya transparansi informasi produk tidak halal*. MUI.or.id. Diakses pada tanggal 11 Juni 2025, dari <https://mui.or.id/baca/berita/kasus-ayam-goreng-widuran-lph-lppom-soroti-pentingnya-transparansi-informasi-produk-tidak-halal>.